

PENCAPAIAN PROFESIONALISME POLRI MELALUI PENGEMBANGAN STRATEGI EKSTERNAL PENERAPAN POLMAS¹

Astuti, P. Tri Marhaeni

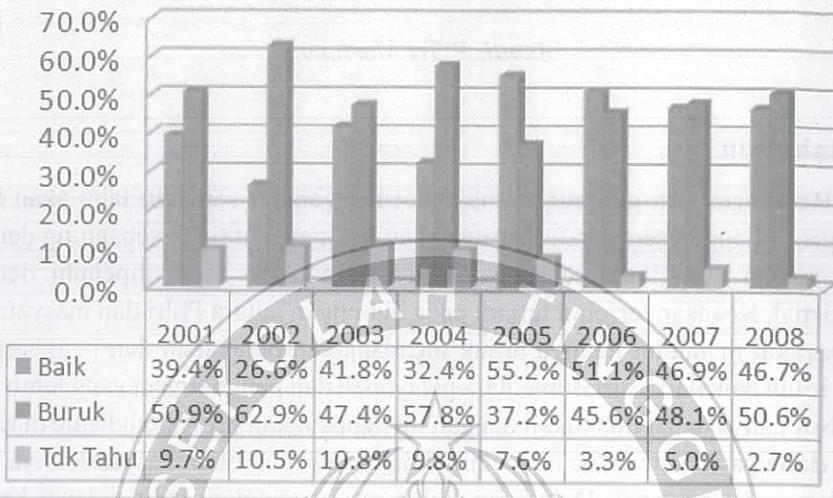
Pendahuluan

Reformasi dan globalisasi membuat masyarakat semakin tahu akan hak-haknya, walaupun seringkali tuntutan akan hak tersebut tidak sebanding dengan pelaksanaan kewajiban, sehingga haknya pun tidak dapat dipenuhi dengan maksimal. Keadaan tersebut terjadi pada hubungan antara Polri dan masyarakat, masyarakat menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan dan penghargaan yang lebih baik dari Polri, sementara pelayanan dan penghargaan yang lebih baik tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengupayakan profesionalisme di tubuh Polri dan upaya pencapaiannya wajib didukung penuh oleh masyarakatnya baik moril maupun materiil. Dukungan inilah yang seringkali sulit didapat karena sikap masyarakat yang pasif dan apatis, memang sikap tersebut tidak timbul dengan sendirinya, ada banyak alasan mengapa masyarakat bersikap demikian diantaranya sikap Polri ketika zaman Orde Baru dahulu yang cenderung militeristik sehingga terkesan angker, kaku dan arogan membuat masyarakat kurang simpatik, sehingga masyarakat pun mengambil sikap pasif dan apatis apabila berurusan dengan polisi. Begitupula dengan adanya tindakan berlebihan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Oknum Polisi. Tindakan tersebut tanpa disadari menciptakan “jarak” antara Masyarakat dan Polisi yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil jajak pendapat yang dilakukan *Litbang Kompas* yang dimuat dalam *Kompas* tanggal 30 Juni 2008 tentang *Problem Profesionalitas di Tubuh Kepolisian* hasilnya sebagai berikut²:

Dalam keadaan citra Polri yang belum baik di mata masyarakat, Polri melancarkan penerapan konsep Polmas sebagai Falsafah dan Strategi. Sebagai suatu falsafah, perwujudan Polmas diharapkan dapat merasuk dalam sikap perilaku setiap anggota Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap serta saling menghargai antara polisi

1 “Rekonstruksi Sikap dan Perilaku Anggota Polri dan Image Profesionalisme”. Disampaikan pada seminar Akademi Kepolisian “Sikap dan Perilaku Anggota Polisi dalam Menghadapi Tantangan Tugas yang Semakin Kompleks”, Semarang, 17 Juli 2008.

Citra Polri



Sumber: Litbang Kompas

dengan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai suatu strategi/program, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Penerapan konsep Polmas tersebut sangat membutuhkan profesionalisme untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan kerjasama berdasarkan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Namun sampai saat ini profesionalisme masih menjadi suatu dilema, di satu sisi anggota dituntut untuk bekerja profesional tapi unsur-unsur yang mendukung profesionalisme itu sendiri kurang dipenuhi seperti masalah kualitas SDM, sarana dan prasarana, anggaran dan kemampuan ilmu kepolisian. Lalu bagaimana konsep Polmas dapat dijalankan dengan baik? Oleh karena itu kita harus menemukan solusi atas permasalahan yang mendasar ini terlebih dahulu sebelum anggota Polri dihadapkan langsung dengan masyarakat untuk bekerjasama menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, karena masyarakat akan dapat melihat lebih jelas

bagaimana kualitas SDM Polri serta permasalahannya dan segala keterbatasan yang dimiliki oleh anggota Polri. Dengan tingkat kualitas SDM anggota Polri seperti saat ini akan timbul perasaan rendah diri pada anggota Polri. Padahal pelaksanaan konsep Polmas harus dijalankan dengan penuh percaya diri, dan hal ini akan dapat dimiliki oleh seorang anggota Polri diantaranya apabila dibekali dengan ilmu yang cukup, moral yang baik dan berada dalam standar kehidupan ekonomi yang layak. Sementara apabila ilmu yang dimiliki kurang, moralitas rendah dan beban kehidupan ekonomi membelit, bagaimana masyarakat dapat percaya bahwa anggota Polri mampu membantu menyelesaikan masalah di masyarakat sementara dalam dirinya pun masih bermasalah?

Dengan mengimplementasikan ilmu kepolisian yang penulis dapat selama ini, penulis berusaha untuk mencari solusi yang tepat dengan pendekatan antar bidang dalam mengatasi masalah SDM anggota Polri melalui penerapan Polmas ini dengan tujuan agar penerapan Polmas dapat dijalankan dengan realistis dan maksimal, dan beriringan dengan upaya pencapaian profesionalisme Polri.

Dalam tulisan ini, penulis ingin lebih membuka pikiran, bahwa tujuan Polmas bukan saja bekerjasama mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat tetapi atas dasar kemitraan, maka masyarakat pun harus membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Polri (sebagai bagian dari unsur masyarakat pula) yaitu diantaranya adalah masalah profesionalisme tersebut yang sampai saat ini masih jadi permasalahan Polri. Sebagaimana dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005, tgl 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas, ditetapkan strategi internal dan strategi eksternal. Strategi internal menyangkut hal-hal yang dilakukan oleh Polri sedangkan strategi eksternal menyangkut hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam tulisan ini penulis bermaksud lebih mengembangkan strategi eksternal karena dari pengembangan inilah terdapat peluang besar untuk mencapai profesionalisme Polri.

Polmas dan Profesionalisme Polri

Salah satu tujuan dari penerapan Polmas disebutkan bahwa “Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisa/evaluasi atas

pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir”.

Selanjutnya untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas, maka sasaran yang harus dicapai diantaranya adalah “membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap kerjasama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat”.

Dalam rangka membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga, maka Polri harus memiliki profesionalitas yang memadai. Dalam bulan September 2004, ketika diadakan peringatan “Sewindu KIKI-UI”, dilontarkan pendapat bahwa profesionalisme Polri akan terwujud atas “kesiapan aparat kepolisian, yaitu kesiapan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran”. Sebagai bagian yang termasuk dalam kesiapan SDM adalah termasuk pentingnya peningkatan kemampuan ilmu kepolisian yang akan berdampak pada pola pikir dan sikap serta prilaku anggota Polri.

Berbicara mengenai profesionalisme dalam penerapan Polmas, Parsudi Suparlan berkali-kali menekankan pentingnya kelayakan gaji bagi anggota Polri dalam rangka pencapaian profesionalisme Polri. Hal ini perlu diperhatikan dan diupayakan terus realisasinya mengingat kemampuan beliau dalam penguasaan ilmu kepolisian tidak diragukan lagi. Beberapa hal yang beliau (Suparlan, 2008: 172)³ ungkapkan dalam tulisannya mengangkut hubungan antara profesionalisme dan penerapan Polmas adalah bahwa:

“Tanpa gaji yang cukup maka semua pedoman yang dibuat, hanya akan menjadi hiasan bibir (*lip service*) saja, dan menjadi ketentuan-ketentuan yang ideal tetapi tidak aktual atau tidak operasional alias tidak ada dalam kenyataannya”. Selanjutnya dalam tulisan lain beliau mengemukakan bahwa “Pada prinsipnya penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas Polmas secara mencukupi adalah bertujuan agar petugas tersebut dapat dengan sungguh-sungguh memusatkan perhatian pada tugas-tugas penerapan Polmas secara penuh, tanpa diganggu oleh desakan berbagai kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhinya yang menyebabkan mengesampingkan tugas-tugas Polmas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sambilan”. Dan selanjutnya Suparlan (2008:

2 Suparlan, Parsudi. “Ilmu Kepolisian”. Editor Chryshnanda DL dan Yulizar Syafrli. Jakarta: YPKIK, 2008.

172)⁴ mengungkapkan: “Pada waktu kita berbicara mengenai profesionalisme kita berbicara mengenai keahlian dalam kerja yang dengan keahlian tersebut si petugas diberi gaji atau pembayaran yang cukup atau lebih dari cukup, sehingga dapat secara sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dikerjakan karena dengan pekerjaannya tersebut dia memperoleh gaji untuk membiayai hidupnya beserta keluarganya secara layak sebagai warga masyarakat”.

Pendapat tersebut dikuatkan pula oleh Sarwono (2008: 84)⁵ yang mengungkapkan bahwa: “...masih banyak juga kekurangan yang harus terus diperbaiki, khususnya yang menyangkut sarana dan prasarana serta kesejahteraan anggota ketika bertugas”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Babinkamtibmas di Polsek Serang pun disimpulkan, bahwa corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas Polsek Serang diperoleh dari gaji yang diterima setiap bulannya dan dari sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan perannya sebagai Babinkamtibmas. Dan bagi anggota yang merangkap tugas, maka pendapatan tambahan juga diperoleh dari pelaksanaan tugas utamanya. Oleh karena orientasi kegiatannya lebih tertuju pada kegiatan yang berpotensi pada materi, maka pelaksanaan tugasnya pun berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan berdasarkan manajemen kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman kerja Babinkamtibmas, yaitu buku petunjuk lapangan Babinkamtibmas nomor Bujuklap/17/VII/1997, sehingga banyak kegiatan Babinkamtibmas lainnya yang tidak dilaksanakan. Perilaku Babinkamtibmas tersebut dapat dikatakan tidak melaksanakan perannya sebagai Babinkamtibmas dan termasuk dalam penyimpangan pekerjaan. Namun kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada pribadi Babinkamtibmas semata, karena negara, penyelenggara fungsi kepolisian, dan masyarakat pun turut andil dalam terciptanya perilaku penyimpangan. Perilaku penyimpangan tersebut terjadi sampai saat ini seiring dengan masalah pembiayaan yang dihadapinya yang disebabkan tidak memadainya gaji yang diberikan negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu telah berlangsung puluhan tahun, sehingga corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas ini dilakukan secara turun temurun dan telah menjadi budaya organisasi.

Disamping masalah kesejahteraan yang menghambat pencapaian profesionalisme Polri juga masalah penguasaan ilmu kepolisian yang masih

3 Ibid, Hal 172

4 Sarwono, W. Sarlito. “Sarlito Wirawan Sarwono Dari Tegal ke Internasional Yang Penting Usaha”. Editor Threes Emir. Jakarta: YPKIK, 2008.

sangat terbatas yang disebabkan masih terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan ilmu kepolisian. Padahal peningkatan ilmu kepolisian akan berdampak pada perbaikan pola pikir, sikap dan perilaku yang akan menimbulkan sikap bijaksana dan amanah, sehingga dengan diiringi oleh peningkatan kesejahteraan yang memadai, maka akan timbul rasa syukur dan upaya untuk terus meningkatkan kinerja berupa pengabdian dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mengenai pentingnya pendidikan ilmu kepolisian dalam menunjang profesionalisme Polri, Sarwono (2008: 89)⁶ mengungkapkan bahwa: "Kembali kepada para anggota di lapisan bawah. Kalau mereka yang justru sehari-harinya berhadapan dengan masyarakat, kurang mendapat perhatian dalam segi pendidikan, tidak heran jika jiwa pelayanan yang mereka tampilkan juga seadanya, jauh dari harapan masyarakat".

Pengembangan Strategi Eksternal Penerapan Polmas

Diatas telah diuraikan akan hubungan yang erat antara penerapan Polmas dan profesionalisme Polri yang diantaranya mencakup kesejahteraan, penguasaan ilmu kepolisian, perbaikan pola pikir dan sikap perilaku. Tanpa profesionalitas yang memadai tidak mungkin penerapan Polmas dapat berjalan dengan baik, namun yang terjadi saat ini Polri belum memiliki profesionalitas yang memadai lalu apa mungkin penerapan Polmas dapat tetap dijalankan? Mungkin saja apabila strategi Penerapan Polmas dapat di arahkan beriringan dengan upaya pencapaian profesionalisme. Cara pandang kita saat ini yang lebih menekankan kerjasama Polri dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat harus dikembangkan dengan menekankan pula kerjasama Polri dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Polri yang tidak dapat diatasi oleh Polri sendiri. Cara pandang tersebut dituangkan dalam pengembangan strategi penerapan Polmas yang telah ada yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005, tgl 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas, maka ditetapkan beberapa kebijakan penerapan Polmas diantaranya dalam bidang manajemen anggaran/keuangan, kebijakan yang digariskan diantaranya dalam point 3) meliputi:

"Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat,

⁵ Ibid, Hal 89

sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan”.

Selanjutnya ditetapkan strategi dan program penerapan Polmas yang terdiri dari strategi internal dan strategi eksternal. Strategi internal menyangkut hal-hal yang dilakukan oleh Polri sedangkan strategi eksternal menyangkut hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Strategi Eksternal (Masyarakat) point 1) dan 2) yaitu:

1. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya.
2. Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.

Atas dasar kebijakan dan strategi tersebut, penulis menangkap adanya peluang bagi upaya pencapaian profesionalisme Polri melalui Pengembangan strategi eksternal yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan dan penyediaan sarana dan prasarana

Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mendukung dan memperjuangkan hak anggota Polri melalui DPR untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku demi peningkatan kinerja Polri dan tercapainya Kamtibmas serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Apabila pemerintah tetap tidak bersedia untuk menaikkan gaji anggota Polri, maka mau tidak mau setiap daerah harus memikirkan pengumpulan dana secara legal dan rutin melalui mekanisme yang disepakati bersama antara DPRD, Pemda, dan unsur-unsur masyarakat lainnya untuk dapat menggaji anggota Polri di daerahnya dengan layak. Hal tersebut mungkin dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polsek serang diketahui bahwa sebenarnya kemampuan masyarakat untuk menggaji anggota Polri itu ada, tetapi selama ini disalurkan melalui cara yang ilegal, sehingga membuat anggota Polri terjebak dalam penyimpangan.

Begitupula dengan penyediaan sarana dan prasarana sebaiknya Polri mengajukan anggaran bagi penyediaannya kepada pemerintahan daerah

setempat dan DPRD, agar sesuai dengan kemampuan daerah dan masyarakatnya penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Polri dapat terpenuhi demi kelancaran tugas menjaga Kamtibmas di daerahnya.

2. Peningkatan Ilmu Kepolisian

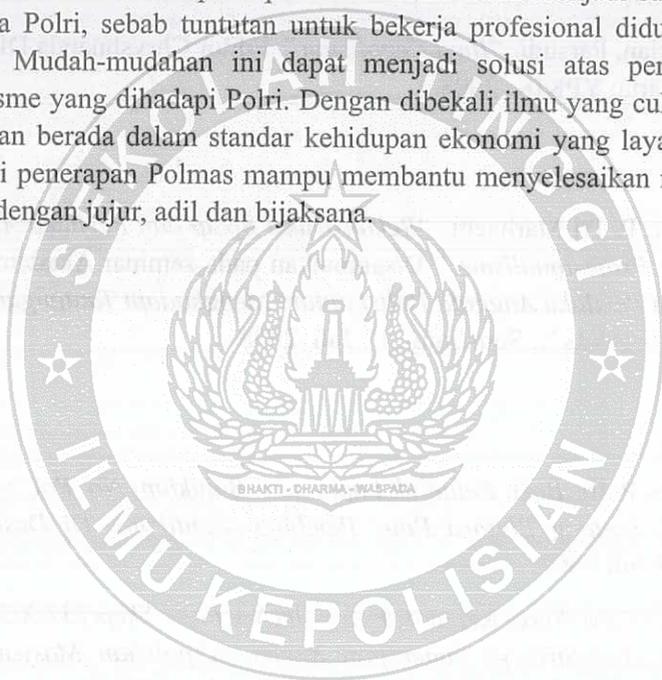
Saat ini kemampuan anggaran Polri untuk mendidik anggotanya mengikuti pendidikan formal Ilmu Kepolisian masih sangat terbatas dibandingkan dengan total jumlah polisi di Indonesia, hal ini disebabkan karena terbatasnya biaya yang dimiliki anggota Polri untuk mengikutinya. Sementara ilmu kepolisian adalah dasar dari penerapan Polmas, karenanya atas dasar kemitraan Polri dengan masyarakat setempat, maka untuk meningkatkan kualitas SDM Polri demi peningkatan pelayanan Polri terhadap masyarakat di daerahnya, maka sebaiknya pembiayaannya dibantu dari hasil pengumpulan dana yang secara legal dan rutin melalui mekanisme yang disepakati bersama antara DPRD, Pemda, dan unsur-unsur masyarakat yang berpotensi secara materi. Sehingga dengan dana tersebut Polri dapat mengajukan permohonan beasiswa untuk membiayai pendidikan anggotanya demi meningkatkan kualitas SDMnya. Dengan peningkatan kemampuan ilmu kepolisian seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan dapat memecahkan masalah sosial secara holistik dan sistemik karena permasalahan yang terjadi di masyarakat sesungguhnya bukan disebabkan oleh satu penyebab masalah saja melainkan oleh sejumlah permasalahan atau gejala-gejala yang secara keseluruhan terlihat hanya sebagai satu masalah/isu. Dalam penyelesaiannya harus dilakukan pendekatan antar bidang, yaitu atas dasar Ilmu Kepolisian diatas, agar penyelesaian masalah tuntas, tidak secara sepotong-sepotong dan tidak menimbulkan masalah baru yang terus berkembang.

3. Peningkatan kualitas moral

Kualitas moral anggota Polri sangat berdampak pada keberhasilan penerapan Polmas, yang selanjutnya akan dirasakan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh agama di lingkungan sekitar melalui kegiatan kerohanian yang diselenggarakan bersama-sama dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengamalan agama yang semakin hari semakin mendalam. Program ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena dalam pelaksanaan tugasnya

anggota Polri sangat rentan dari godaan penyimpangan pekerjaan dan wewenang.

Dengan pengembangan strategi eksternal Penerapan Polmas tersebut diharapkan upaya pencapaian profesionalisme Polri dapat berjalan seiring dengan penerapan Polmas sehingga lambat laun kepercayaan dari masyarakat pun akan tumbuh sehingga pelaksanaan kerjasama berdasarkan kemitraan antara Polri dan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Dengan adanya kerjasama saling membantu permasalahan masing-masing antara Polri dan masyarakat maka diharapkan profesionalisme tidak menjadi suatu dilema bagi anggota Polri, sebab tuntutan untuk bekerja profesional didukung oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan profesionalisme yang dihadapi Polri. Dengan dibekali ilmu yang cukup, moral yang baik dan berada dalam standar kehidupan ekonomi yang layak anggota Polri melalui penerapan Polmas mampu membantu menyelesaikan masalah di masyarakat dengan jujur, adil dan bijaksana.



DAFTAR REFERENSI

Buku :

Sarwono, W. Sarlito. *“Sarlito Wirawan Sarwono Dari Tegal ke Internasional Yang Penting Usaha”*. Editor Threes Emir. Jakarta: YPKIK, 2008.

Sopandi, Tedy. *Pembiayaan Kebutuhan Hidup Babinkamtibmas Di Polsek Serang*. Sebuah Tesis Untuk mencapai gelar Magister Ilmu Kepolisian, KIK UI. Jakarta, 2007.

Suparlan, Parsudi. *“Ilmu Kepolisian”*. Editor Chryshnanda DL dan Yulizar Syafri. Jakarta: YPKIK, 2008.

Makalah

Astuti, P. Tri Marhaeni. *“Rekonstruksi Sikap dan Perilaku Anggota Polri dan Image Profesionalisme”*. Disampaikan pada seminar Akademi Kepolisian *“Sikap dan Perilaku Anggota Polisi dalam Menghadapi Tantangan Tugas yang Semakin Kompleks”*,. Semarang, 17 Juli 2008.

Dokumen

Mabes Polri. *Buku Petunjuk Lapangan (Bujuklap) No. Pol. : Bujuklap/17/VII/ 1997, Tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas Di Desa/Kelurahan*. Jakarta: 18 Juli 1997.

Mabes Polri. *Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005. Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Tanggal 13 Oktober 2005.*